

**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**  
**DAMPAK ISU ROHINGYA TERHADAP EKSTREMISME**  
**KEKERASAN DI INDONESIA**



**Debbie Affianty**

NIDN: 0326017403

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**2019**

## I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persekusi atas dasar agama dan ras serta bentuk kekerasan lainnya dari militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mendorong terbentuknya *imagined solidarity* dan kekerasan simbolik di kalangan simpatisan, pendukung, dan pengikut kelompok ekstremisme kekerasan di Indonesia. Penelitian ini juga melihat adanya penggunaan serta reproduksi narasi solidaritas Rohingya yang sedang bertempur melawan tentara Myanmar untuk menggalang dukungan untuk mendanai kegiatan ekstrimisme kekerasan maupun upaya menciptakan konflik di Indonesia. Konflik sektarian merupakan salah satu *enabling environment* bagi kelompok ekstremisme kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat:

1. Bagaimana pola pergerakan dan strategi kelompok ekstrimisme kekerasan di Indonesia melakukan rekrutmen anggota-anggota baru dengan menggunakan isu Rohingya?
2. Bagaimana kelompok ekstrimisme kekerasan membangun jaringan dan mereproduksi nilai ekstrimisme kekerasan (*secara on line* maupun *off line*) di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia?
3. Bagaimana kelompok-kelompok tersebut menyusun kekuatan untuk mendelegitimasi pemerintah sehingga masyarakat percaya dengan sistem alternatif yang mereka tawarkan?
4. Apa upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan kontra narasi dan kontra aksi terhadap kelompok-kelompok ekstrimisme kekerasan tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data diambil melalui studi dokumen serta wawancara mendalam. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat kementerian dan lembaga negara serta lembaga kemanusiaan di Indonesia, selain itu juga beberapa tokoh *exiled* Rohingya dan pengungsi yang ada di Penang dan Kuala Lumpur (Malaysia). Berikut daftar informan kunci dalam penelitian ini:

No.	Nama	Institusi	Jabatan	
1.	Pribadi Sutiono	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Asisten Deputi Hubungan Bilateral untuk Asia, Pasifik dan Afrika	Jakarta, Indonesia

2.	Andhika Chrisnayudhanto	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Direktur Regional and Multilateral	Jakarta, Indonesia
3.	Indriana Kartini	Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI	Peneliti	Jakarta, Indonesia
4.	Deka Anwar	Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)	Peneliti	Jakarta, Indonesia
5.	Nasir Abbas	Division of Applied Social Psychology Research (DASPR) UI	Konsultan Senior	Jakarta, Indonesia
6.	Hilman Latief	Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu)	Direktur Utama	Yogya, Indonesia
7.	Rachmawati Hussein	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)	Wakil Ketua	Yogya, Indonesia
8.	Abdul Malik	MDMC	Sekretaris II, tim bantuan ke Cox's Bazar	Jakarta, Indonesia
9.	Lukman Azis Kurniawan	Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Director	Jakarta, Indonesia
10.	Mohammad Islam	United Islamic Rohingya Organization for Development (UNIROD)	Chairman	Penang, Malaysia
11.	Mohammad Sadek	Coalition of Rohingya Organizations in Malaysia	Secretary General	Ampang, Selangor, Malaysia
12.	Sharifah Shakirah	Rohingya Women Development Network	Director	Gombak, Malaysia
13.	Tengku Emma Zuriana	The European Rohingya Council	Ambassador to Malaysia	Kedah, Malaysia
14.	Ajmeer Omar	Rohingya Vision TV	Anchor	Kuala Lumpur, Malaysia
15.	Ziaur Rahman	-	Rohingya Refugee	Kuala Lumpur, Malaysia
16.	Kyaw Win	Burma Human Rights Network	Executive Director	London, UK

## II. Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar

Banyak perdebatan di seputar asal-usul etnis Rohingya di Myanmar. Beberapa sumber menyatakan etnis Rohingya sudah ada sejak abad ke-8 ketika Dinasti Mrauk U berkuasa di Arakhan (sekarang Rakhine). Sementara sumber yang berbeda menyatakan bahwa etnis Rohingya dibawa oleh penjajah Inggris dari Bangladesh untuk memenuhi kebutuhan pekerja di Myanmar.<sup>1</sup>

Rohingya adalah etnis kedua terbesar yang bermukim di negara bagian Rakhine atau dulunya disebut dengan Arakan di Myanmar. Dengan luas wilayah sebesar 36,762 km<sup>2</sup> di pesisir Barat Myanmar, Rakhine memiliki lima distrik, yaitu Sittwe, Mrauk-U, Maungdaw, Kyaukphyu, dan Thandwe, dengan Sittwe sebagai ibu kota negara bagian. Kelima distrik tersebut memiliki 17 kota dan 1.164 desa.<sup>2</sup> Penduduk Rohingya merupakan etnis mayoritas di tiga kota, yaitu Buthidaung, Maungdaw and Rathedaung.



Sebelum junta militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 1962, masyarakat Rohingya diakui sebagai etnis asli warga Myanmar. Mereka memiliki wakil-wakil di parlemen dan beberapa jabatan di kantor-

<sup>1</sup> The Rohingya Origin Story: Two Narratives, One Conflict, Tanenbaum, 2017.

<sup>2</sup> About Rakhine State, <https://www.investrakhine.com/about-rakhine-state/>

kantor pemerintahan. Namun kemudian pemerintah Myanmar berhenti merekrut komunitas Rohingya untuk menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1970-an. Orang Rohingya tidak diperbolehkan menjadi aparat keamanan (polisi atau militer). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Rohingya dianggap sebagai penduduk “non-nasional” atau “pemukim asing”. Pemerintah juga melarang Rohingya untuk bergerak bebas di negeri tersebut bahkan untuk bepergian dari satu desa ke desa lain yang berdekatan dengan tempat domisilinya. Hal ini menghambat perkembangan sosial-budaya, ekonomi, pelayanan pendidikan dan kehidupan sehari-hari orang Rohingya. Mereka tidak diperbolehkan melakukan perdagangan dan bisnis dengan leluasa. Pelarangan untuk memiliki anak tidak lebih dari dua orang juga diberlakukan pada keluarga-keluarga Rohingya di negara bagian Rakhine. Muslim Rohingya diwajibkan untuk tidak menggunakan nama-nama Islam dan mengadopsi nama-nama Myanmar. Ratusan masjid dirusak dan pembangunan masjid baru ataupun perbaikan masjid yang lama dilarang. Pagoda, monasteri dan kuil Buddha dibangun di tanah Rohingya. Tanah-tanah mereka direbut oleh para pendatang Buddha yang diundang untuk bermigrasi dari dalam dan luar Myanmar. Penerapan pajak yang tinggi terhadap produk-produk pertanian, kerja paksa, dan disitanya lahan-lahan pertanian serta berbagai pembatasan pertanian membuat mereka meninggalkan lahan mereka, hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Jumlah pedagang dan pengusaha Rohingya juga menurun tajam.<sup>3</sup> Karena perlakuan diskriminasi, masyarakat Rohingya menjadi tidak memiliki tanah dan tidak memiliki rumah. Mereka juga mendapat perlakuan kekerasan dari pemerintah Myanmar. Banyak penduduk Rohingya yang kemudian mengungsi ke Bangladesh, pertama pada tahun 1978 kemudian tahun 1991-1992. Sebagian besar mereka mengungsi ke Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, UAE, Thailand dan Malaysia. Gelombang pengungsi besar-besaran kemudian terjadi pada tahun 2012-2013 dan 2016-2017.

Pada bulan September 2018, Misi Pencari Fakta PBB (the United Nation's Fact Finding Mission) mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahwa tentara Myanmar harus dituntut untuk bertanggungjawab atas genosida yang telah memaksa sekitar 700.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh pada bulan Agustus 2017.<sup>4</sup>

### **III. Dimensi Krisis Rohingya**

#### **A. Status Kewarganegaraan Rohingya**

Pada tahun 1977, Myanmar mulai mendaftarkan warga negaranya dan tidak memasukkan “orang asing”, yang ditujukan kepada Rohingya. Pada tahun 1978 militer Myanmar menjalankan Operasi Nagamin atau Operasi Raja Naga dengan melakukan penahanan paksa dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya. Tindakan ini menandai upaya pertama militer Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran dari Bangladesh ketika masa penjajahan Inggris sehingga harus dideportasi.<sup>5</sup> Pada bulan Mei 1978, sekitar

---

<sup>3</sup> Lihat Nurul Islam, *Facts about the Rohingya Muslims of Arakan*, Oct 5, 2006, <https://www.rohingya.org/facts-about-the-rohingya-muslims-of-arakan/>, diakses 25 Mei 2019 dan Anders Engvall and Soe Nandar Linn, *Development, Natural Resources and Conflict in Myanmar*, 13 Juni 2013.

<https://www.eastasiaforum.org/2013/06/13/development-natural-resources-and-conflict-in-myanmar/>.

<sup>4</sup> Myanmar: Tatmadaw leaders must be investigated for genocide, crimes against humanity, war crimes – UN report <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23475&LangID=E>

<sup>5</sup> Charles Turner, Rohingya crisis a replay of 'Operation Nagamin' from 40 years ago, <https://www.wikitribune.com/wt/news/article/11337/>

200.000 pengungsi Rohingya masuk ke Bangladesh dan menempati 13 kamp pengungsi milik PBB di perbatasan.<sup>6</sup>

Pada gelombang pengungsi tahun 1978, pemerintah Myanmar masih mengakui Rohingya sebagai penduduk syah di negara tersebut. Hal ini berdasarkan pada dokumen yang berjudul “Kesepakatan Repatriasi” dengan pemerintah Bangladesh dan ditandai dengan kata “Rahasia” tetapi sudah dipublikasi oleh Princeton University pada tahun 2014. Dokumen tersebut menyatakan, “Para pemimpin delegasi, diberi otoritas atas nama Pemerintah Republik Sosialis Burma dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, setelah perundingan diadakan di Daka pada tanggal 7-9 Juli 1978 sepakat sebagai berikut,” dan selanjutnya, “Pemerintah Republik Sosialis Burma sepakat atas repatriasi segera *the lawful residents of Burma* (penduduk legal Burma) yang sekarang berada di kamp-kamp di Bangladesh dengan menunjukkan Kartu Registrasi Nasional Burma bersama dengan anggota keluarga mereka...” Ini memberikan bukti bahwa pada tahun 1978, Burma sepakat bahwa pengungsi Rohingya, yang keluarganya memiliki kartu registrasi nasional atau dokumen lain, secara umum adalah “penduduk legal Burma.”<sup>7</sup>

Operasi Raja Naga dianggap sebagai pembuka jalan bagi Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang tidak memasukkan Rohingya ke dalam daftar etnis yang dianggap berhak mendapat status warga negara. Etnis Rohingya diminta menunjukkan garis keturunan nenek moyang mereka sampai sebelum tahun 1824 ketika Inggris menjajah Myanmar. Mereka yang datang ketika masa penjajahan dianggap bukan warga negara sehingga tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), tidak dapat mengakses layanan publik serta memiliki keterbatasan dalam bergerak.

Keterkaitan agama dan etnisitas terlihat dengan dipersulitnya kalangan Muslim dalam mendapatkan Kartu Registrasi Nasional (NRCs). Hukum di Myanmar mengenal tiga jenis kewarganegaraan: (1) warga negara penuh, (2) warga sekunder dan (3) warga naturalisasi. Untuk menjadi warga penuh, diperlukan bukti yang menunjukkan garis keturunan di Myanmar yang dapat ditelusuri sampai sebelum tahun 1824, ketika Myanmar dijajah Inggris. Jenis warga negara kedua dan ketiga memiliki hak yang terbatas. Semua orang wajib memiliki NRC berdasarkan hukum di Myanmar, kalau tidak, orang tersebut akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal maupun pekerjaan, belum lagi pelecehan terus-menerus oleh yang berwenang serta resiko dipenjar.<sup>8</sup>

NRC memuat etnisitas dan agama pemiliknya, dan Muslim seringkali menghadapi berbagai masalah dalam mendapatkan kartu tersebut, termasuk persyaratan bahwa Muslim harus menyediakan dokumentasi tentang asal-usul nenek moyang yang seringkali tidak mungkin didapat, disangkalnya kartu NRC bagi Muslim, dan penolakan pihak yang berwenang untuk mendaftarkan Muslim sebagai Bamar (mayoritas etnis di Myanmar). Mereka diminta untuk menambah keterangan pada kartu mereka sebagai dari negara dengan mayoritas Muslim seperti Pakistan atau Bangladesh, tanpa mempertimbangkan mereka tidak

---

<sup>6</sup> Anders Corr, Secret 1978 Document Indicates Burma Recognized Rohingya Legal Residence Dec 29, 2016, <https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/12/29/secret-1978-document-indicates-burma-recognized-rohingya-legal-residence/#3f4575cf5a79>

<sup>7</sup> Anders Corr, Secret 1978 Document Indicates Burma Recognized Rohingya Legal Residence Dec 29, 2016, <https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/12/29/secret-1978-document-indicates-burma-recognized-rohingya-legal-residence/#3f4575cf5a79>

<sup>8</sup> Jaume Rius Lopez, *Hate Speech, Interethnic Violence and ‘Muslim-Free’ Villages: The Rohingya Crisis in an Era of International Indifference*, 20 Feb 2019, <https://minorityrights.org/2019/02/20/hate-speech-interethnic-violence-and-muslim-free-villages-the-rohingya-crisis-in-an-era-of-international-indifference/>

memiliki hubungan keluarga dengan negara tersebut. Akibatnya terjadi kondisi *stateless* di mana visi negara Bamar-Buddha ditegakkan, mendominasi semua kelompok-kelompok minoritas dan dengan demikian Rohingya tidak memiliki tempat.<sup>9</sup>

Militer Myanmar kemudian melakukan Operation of Clean and Beautiful Nation pada tahun 1991. Sepanjang tahun 1991 dan 1992, perkosaan, kerja paksa dan persekusi agama menyebabkan 250.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Sebuah dokumen kesepakatan antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh tahun 1992 juga mengakui etnis Rohingya sebagai penduduk legal di Myanmar. Dengan judul "Joint statement by the Foreign Ministers of Bangladesh and Myanmar issued at the conclusion of the official visit of the Myanmar Foreign Minister to Bangladesh 23 - 28 April 1992," kesepakatan tersebut menyebut pelarian Rohingya sebagai "Myanmar residents" dan "members of Myanmar society."<sup>10</sup>

## B. Konflik Etnis dan Agama

Sejak reformasi tahun 2011, Myanmar mengalami peningkatan nasionalisme Buddha, retorika anti Muslim menguat dan kekerasan antara kalangan Buddha dan Muslim. Organisasi nasionalis-Buddha terbesar salah satunya adalah Asosiasi untuk Perlindungan Ras dan Agama atau disingkat "MaBaTha" mengklaim sebagai pelindung ajaran Buddha. MaBaTha saat ini merupakan organisasi terlarang namun penerusnya tetap mendapat dukungan luas masyarakat.

Selain tidak mendapatkan hak untuk kewarganegaraan dan akses ke pendidikan, Rohingya juga menghadapi kebencian dari mayoritas penduduk Buddha di negara bagian Rakhine. Benturan antara penduduk Rakhine yang beragama Buddha dengan etnis Rohingya yang beragama Islam berawal pada tahun 2012 setelah ada kasus bahwa seorang lelaki Rohingya telah memperkosa seorang perempuan Buddha. Puluhan orang meninggal dalam pertarungan antar etnis dan agama.

Menurut Burma Human Rights Network (BHRN), sejak tahun 2012, ada sekitar 21 desa yang menyatakan diri sebagai zona "bebas Muslim". Mereka mendirikan papan peringatan besar yang melarang Muslim untuk memasuki desa-desa tersebut. Papan peringatan tersebut ada yang bertuliskan "Muslim dilarang menginap", "Muslim dilarang membeli atau menyewa properti", "Tidak seorang pun boleh menikahi Muslim", "Jika Anda memberi makan harimau, dia akan menggigit Anda" dan "Jika Anda memberi ruang apa pun bagi Kalar (julukan untuk kulit hitam), negara, ras dan agama Anda akan diberangus".<sup>11</sup> Keberadaan desa-desa ini semakin memperkuat kebencian dan praktek segregasi di Myanmar.

## C. Terorisme

---

<sup>9</sup> Jaume Rius Lopez, *Hate Speech, Interethnic Violence and 'Muslim-Free' Villages: The Rohingya Crisis in an Era of International Indifference*, 20 Feb 2019, <https://minorityrights.org/2019/02/20/hate-speech-interethnic-violence-and-muslim-free-villages-the-rohingya-crisis-in-an-era-of-international-indifference/>

<sup>10</sup> Anders Corr, Secret 1978 Document Indicates Burma Recognized Rohingya Legal Residence Dec 29, 2016, <https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/12/29/secret-1978-document-indicates-burma-recognized-rohingya-legal-residence/#3f4575cf5a79>

<sup>11</sup> Jaume Rius Lopez, *Hate Speech, Interethnic Violence and 'Muslim-Free' Villages: The Rohingya Crisis in an Era of International Indifference*, 20 Feb 2019, <https://minorityrights.org/2019/02/20/hate-speech-interethnic-violence-and-muslim-free-villages-the-rohingya-crisis-in-an-era-of-international-indifference/>

Militer dan pemerintah Myanmar sekarang menghubungkan penyebab konflik dengan “terorisme”. Setelah serangan yang dilakukan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada tahun 2016 dan 2017, Komisi Anti Terorisme milik pemerintah menyatakan ARSA sebagai organisasi teroris. Padahal jika melihat taktik yang digunakan ARSA mirip dengan yang digunakan oleh militer maupun kelompok etnis bersenjata.<sup>12</sup> ARSA lebih tepat disebut sebagai kelompok etno-nasionalis. Dengan berdalih melakukan operasi kontra terorisme, militer Myanmar melancarkan kebijakan “Pyat Lay Pyat (Pemutusan Empat Akses), yaitu akses terhadap makanan, dana, intelijen dan rekrutmen. Namun kebijakan tersebut lebih banyak mengorbankan kalangan sipil etnis Rohingya.”<sup>13</sup>

Menurut Indriana Kartini, kemunculan Harokatul Yaqin atau ARSA dijadikan oleh pemerintah Myanmar sebagai justifikasi mereka tidak sedang membersihkan etnis Rohingya, tetapi teroris.

*“Dan itu diyakini dan disetujui oleh warga Myanmar. Ketika saya pribadi bertemu dengan orang Myanmar, ketika ada acara di ASEAN, mereka bilang ya Rohingya itu bukan orang Myanmar, tapi Bangla. They are from Bangla and they are terrorists. Jadi isunya terrorism. Berarti narasi yang dibuat oleh pemerintah juga diterima oleh masyarakatnya. We are fighting for terrorism in Rakhine. Soalnya di sana ada kelompok teroris yang mengganggu keamanan. Jadi bisa jadi justifikasi untuk menggempur desa-desa di sana. Sedangkan narasi di kelompok Muslim, oh terorisme itu muncul karena ada ketidakadilan, jadi itu berkelindan di Rakhine,” ujar Indriana.*<sup>14</sup>

Mohammad Islam, Ketua United Islamic Rohingya Organization for Development (UNIROD) di Penang, Malaysia, mengatakan bahwa Harokatul Yaqin atau ARSA muncul karena generasi muda tidak sanggup melihat kedzaliman tentara Myanmar dan Arakan Army terhadap orangtua, perempuan, kakak dan adik, dengan membakar rumah dan masjid, membunuh, “Oleh karena itu mereka tidak sanggup lagi, mereka bangkit, bergerak untuk mempertahankan nyawa, agama. ARSA adalah satu kumpulan pemuda gerakan bersenjata supaya mereka yang menyelamatkan ibu bapak sendiri, adik-adik sendiri dari kedzaliman dan perkosaan tentara. Yang kedua, mereka menyelamatkan rumah ibadah Allah, masjid, madrasah. Saya sendiri mendukung gerakan jihad, bukan Al Qaeda. Ini gerakan pemuda tanah air sendiri dengan pakaian sarung kita yang gerak berdiri untuk mempertahankan marwah dan agama,” kata Mohammad Islam yang sudah menjadi pengungsi di Malaysia sejak tahun 1992.<sup>15</sup>

Meskipun ARSA lebih merupakan pemberontak etno-nasionalis di negara bagian Rakhine, ISIS pernah menggunakan narasi penderitaan Rohingya sebagai landasan untuk mengembangkan jaringan di Bangladesh. Publikasi online ISIS, terutama Dabiq, pernah menyebut akan menggunakannya untuk melakukan serangan di Myanmar.<sup>16</sup> Namun menurut Mohammad Islam, ARSA tidak memiliki hubungan

---

<sup>12</sup> Melissa Crouch, *The Twisted Politics of Terrorism in Myanmar*, 12 Sep 2017, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/threat-terrorism-too-convenient-myanmar>

<sup>13</sup> Iftekharul Bashar, *Exploitation of the Rohingya Crisis by Jihadist Groups: Implications for Bangladesh’s Internal Security, Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 9, No. 9 (September 2017), hal. 5, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351550>, diakses pada 20 April 2019.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Indriana Kartini, peneliti di Pusat Pengkajian Politik LIPI, Jakarta, 22 April 2019.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mohammad Islam, Ketua United Islamic Rohingya Organization for Development (UNIROD) di Penang, Malaysia, 29 April 2019.

<sup>16</sup> Iftekharul Bashar, *Exploitation of the Rohingya Crisis by Jihadist Groups: Implications for Bangladesh’s Internal Security, Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 9, No. 9 (September 2017), hal. 5, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351550>, diakses pada 20 April 2019.



dengan organisasi mana pun di luar Myanmar ataupun mencari dana dari luar.<sup>17</sup> Menurutnya dia pernah bertemu dua kali dengan pimpinan ARSA, Atallah Abu Ammar Jununi dan pernah bertanya mengapa ARSA tidak meminta bantuan kepada Jamaah Islamiyah di Indonesia, pada Abu Bakar Baasyir, atau meminjam *askar* dari Bangladesh, Hizbut Tahrir, Pakistan atau Afghanistan.<sup>18</sup>

“Tapi pimpinan ARSA ini menjawab, “Kami tidak perlu mengambil tenaga dari luar. Apabila kita mengambil tenaga dari luar, dunia turun, Amerika turun, menganggap teroris ISIS masuk atau Taliban masuk. Itu akan menjadi alasan Amerika serang, membantu tentara Myanmar. Oleh karena itu kita tidak mengambil langkah pertolongan keuangan daripada luar, tak pernah kita ambil dari luar peralatan-peralatan untuk pertahanan. Kita beli sendiri, mencipta sendiri, tenaga daripada bangsa Rohingya sendiri,” kenang Mohammad Islam.

Menurutnya, ARSA tidak ada kaitannya dengan terorisme ataupun militan yang merusak dunia. “...bukan mahluk perusak agama, bukan mahluk perusak keselamatan dunia. Kita kembalikan hak dan marwah Rohingya dan agama di wilayah Arakhan kita sendiri karena wilayah Arakhan ini pernah mendaulatkan wilayah raja-raja Islam selama 3500 tahun, sebelum mewujudkan merdeka Union of Burma. Saksikan ini ada raja Islam kita bangkit untuk raja Islam, bukan untuk memerdekakan, pisah dari Burma. Kita kembalikan asal-usul hak kita,” kata Mohammad Islam.<sup>19</sup>

Sharifah Shakirah, Direktur Rohingya Women Development Network (RWDN) mengatakan bahwa ARSA tidak mewakili seluruh komunitas etnis Rohingya karena mereka hanya mewakili keluarga-keluarga mereka saja.<sup>20</sup> Menurutnya, ARSA tidak dapat membantu mengembalikan hak-hal Rohingya sebagai warga negara. Namun dia tidak setuju jika ARSA dikategorikan sebagai teroris. “*This group came up to fight because they could not tolerate the pain, the rape, the torture, the burning. All these things. When a group came up saying I am fighting my rights I cannot tolerate this anymore, my daughter has been raped. I fight for my rights. You call them terrorist? It is very shameful, very sad that the world now is like that...C’mon, they don’t even have proper arms. They don’t even wear proper shoes, they wear longyi to fight. Are you scared of them? Really?*” katanya. Sharifah mengatakan bahwa di Rakhine State ada Arakan Army, pasukan non Muslim yang juga melawan tentara Myanmar namun tidak dikategorikan sebagai teroris. “*Arakan Army, they have been going to Rohingya villages, fighting against Myanmar government but making Rohingya as a shield. Recently around 50 Rohingya people have been killed by AA, by Myanmar government because of AA. What people talk about them? Are they not wrong? Are they not terrorists? No. Because they are non Muslim,*” katanya.

Ziaur Rahman, salah satu pengungsi Rohingya di Malaysia yang juga aktif mengkampanyekan HAM, tidak setuju dengan apa yang dilakukan ARSA. “*What I think, ARSA cannot do anything because Myanmar government will keep calling us terrorist if ARSA attack again and again. Millions and millions of people will be killed. What will happen after that? It is not meaningful. So ARSA is useless, you know. It is stupid*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mohammad Islam, Ketua United Islamic Rohingya Organization for Development (UNIROD) di Penang, Malaysia, 29 April 2019.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mohammad Islam, Ketua United Islamic Rohingya Organization for Development (UNIROD) di Penang, Malaysia, 29 April 2019.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Mohammad Islam, Ketua United Islamic Rohingya Organization for Development (UNIROD) di Penang, Malaysia, 29 April 2019.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sharifah Shakira, Direktur Rohingya Women Development Network (RWDN), di Kuala Lumpur, 2 Mei 2019.

*and nonsense. They attack three police but they will kill hundred, thousands people. There were many freedom fighters before ARSA. Even my uncle was RSO member. They have lost lives. So talk peace and bring peace.”*<sup>21</sup> Namun ia tidak setuju dengan pemerintah Myanmar yang memberi label pada ARSA. *“Myanmar military said that ARSA is terrorist. But that’s not true. They just try to defend their country, our people.”* Menurut Ziaur, ARSA mempunyai banyak pemimpin di seluruh dunia. *“I cannot say they have branches but they have people around the world. Some people taking action using their name I don’t know they sent it or not,”* ujarnya.

Mohammad Sadek, Secretary General of Coalition of Rohingya Organizations in Malaysia (CROM) mengatakan bahwa saat ini ada beberapa jenis ARSA. *“For example, I don’t like somebody, I kill the person. After killing I say, I am ARSA, you know. This kind of self-claiming ARSA occurs because ARSA doesn’t have systematic rule of command. Nobody knows the leader of ARSA in the past. They have different names,”* katanya.<sup>22</sup>

Seorang exil Rohingya yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa ARSA adalah ISIS yang dibentuk oleh pemerintah Myanmar untuk merusak imej Rohingya. *“Those commanders in ARSA were not born in Arakan. They recruited such people from Pakistan, Saudi Arabia, and other countries and simply dropped to Myanmar. If they are not recruited by Myanmar government, why not a single member ARSA died when fighting in a battle field. All the villages are burnt but not a single “mujahid” died. ARSA uniform is black. ISIS uniform is black. So, government recruited. I can give example. There are five villages where are such people influence? Where is the headquarter? Villages, areas of top leader of ARSA have no single house burnt there.”* Menurutnya, 100% of warga Rohingya percaya pada ARSA. Banyak penduduk desa yang bergabung dengan ARSA untuk melawan tentara Myanmar. *“Even some husbands divorced their wives and given up to ARSA leaders. These ARSA leaders kill more than three hundreds talent people. Raped. We are blaming military raped. ARSA kidnap people in the refugee camps. Hundreds of women are raped by ARSA members. They are the mastermind everywhere. Our people support them. If I am against them they may kill me,”* katanya.

Senada dengan pendapat tersebut, Kyaw Win, Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN), menganggap ARSA sebagai organisasi proxy dari militer.<sup>23</sup> *“They are the one who conducted according to the interest of the military. They just conducted to make military operation possible. So you see, because of these attacks, 800.000 Rohingya Muslim are out of Burma. ARSA group creates this kind of violence, they kill many Rohingyas as well. Until today they are killing. I do not know what kind of ARSA looks like but every one of us is really shocked that they are so much active against the Rohingya’s interest. They are not against the military interest,”* katanya. Menurut Kyaw Win, dulu pernah ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh the Rohingya Solidarity Organisation (RSO) namun organisasi tersebut telah dibubarkan sejak tahun 1990-an. *“RSO now changes their way, they go through diplomatic way. They try to solve this problem with dialogue,”* katanya. Sedangkan Arakan Rohingya National Organization (ARNO), menurut Kyaw Win, adalah organisasi politik semata. *“Muslims never consider to respon the issue with arms struggle. No one believes that and no one wants to face that kind of brutality such as burning alive. No one, nobody wants to see it. Nobody wants this,”* katanya.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ziaur Rahman, pengungsi Rohingya di Kuala Lumpur, 30 April 2019.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mohammad Sadek, Secretary General of Coalition of Rohingya Organizations in Malaysia (CROM), 2 Mei 2019.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kyaw Win, Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN) di Jakarta, 14 Mei 2019.

#### D. Kepentingan Ekonomi-Politik

Konfrontasi antara warga Buddha dan Muslim cepat terjadi ketika ada persaingan atas tanah dan sumberdaya yang terbatas.<sup>24</sup> Banyak yang menilai bahwa pengusiran Rohingya serta perampasan tanah milik mereka merupakan rencana sistematis dari pemerintah Myanmar untuk memenuhi keinginan investor. “Kenapa pemerintah Myanmar sangat keras terhadap Rohingya, sepertinya memang ingin mengusir? Karena memang ternyata itu di daerahnya Rohingya termasuk jalur BRI-nya China. Belt Road Initiative China masuk ke wilayah Myanmar, itu kan masuknya ke daerah Rohingya, di Rakhine,” ujar Indriana Kartini, peneliti di Pusat Pengkajian Politik LIPI.<sup>25</sup> Menurutnya, krisis Rohingya perlu dilihat dari aspek geopolitik dan geostrategis.

Cina dan India tertarik untuk membangun mega proyek di Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di Rakhine, di mana Cina memilih kota Kyaukphyu sementara India di Sittwe. Kedua negara tersebut menganggap Rakhine memiliki makna strategis secara geopolitik. Daerah pesisir Rakhine memberikan akses Cina ke Laut Indian dan Teluk Bengali dan ini memberikan peluang pada Cina untuk memperkuat jaringan perdagangan serta militernya dengan Pakistan, United Arab Emirates, Irak, Iran, dan Saudi Arabia. Sedangkan bagi India, wilayah tersebut penting untuk mengawasi provinsi-provinsi di India bagian Utara, seperti Mizoram, Tripura, Manipur, Arunachal, Assam, Meghalaya, Nagaland, dan Sikkim. Wilayah-wilayah tersebut tidak terlalu terkait dengan India daratan dan mengalami banyak gerakan separatis atau pemberontakan. Selain itu juga berbatasan dengan Bhutan, Cina, Myanmar and Bangladesh<sup>26</sup>

Rakhine juga menjadi bagian dari One Belt One Road (OBOR) Initiative yang akan membangun rute baru dan jaringan perdagangan Cina ke benua Eropa, Afrika dan Asia. Pembangunan jaringan pipa minyak dan gas di Rakhine merupakan strategi geopolitik Cina untuk mendapatkan rute alternatif selain Selat Malaka yang selama ini merupakan rute terdekat untuk mencapai Afrika dan Timur Tengah. Namun Selat tersebut seringkali menjadi sasaran bajak laut selain itu juga jika terjadi konflik di Laut Cina Selatan, maka Cina dapat menghindari adanya blokade di jalur tersebut. Saat ini 80% impor minyak dari Timur Tengah melalui rute ini. Dengan jalur pipa dari Rakhine, minyak dari Abu Dhabi, Irak, Iran dan Saudi Arabia dapat mencapai Cina dengan lebih cepat dan aman.<sup>27</sup>

Cina telah memiliki kesepakatan dengan militer Myanmar pada tahun 2008, untuk membangun jaringan pipa minyak mentah. Setelah sempat tertunda, jaringan pipa Cina-Myanmar mulai mengalirkan minyak dari pelabuhan Pulau Made di Rakhine ke Yunnan pada bulan April 2017, empat bulan sebelum terjadi eskalasi krisis di Rakhine. Pada tahun 2004, perusahaan Korea Selatan Daewoo menemukan 4,5 trilyun kubik kaki cadangan gas di wilayah pesisir. Myanmar menandatangani MoU dengan Petro China pada tahun 2005 dengan menjual cadangan gas di Blok A-1 Shwe dengan jalur pipa gas yang menghubungkan Cina-Myanmar. Sejak tahun 2008, perusahaan minyak milik negara Cina, the China National Petroleum

---

<sup>24</sup>Anders Engvall and Soe Nandar Linn, *Development, Natural Resources and Conflict in Myanmar*, 13 Juni 2013, <https://www.eastasiaforum.org/2013/06/13/development-natural-resources-and-conflict-in-myanmar/>

<sup>25</sup> Wawancara dengan Indriana Kartini, peneliti di Pusat Pengkajian Politik LIPI, Jakarta, 22 April 2019.

<sup>26</sup> Ashrafuzzaman Khan, *The Strategic Importance of Rakhine State*, <https://www.thedailystar.net/news/opinion/perspective/the-strategic-importance-rakhine-state-1628290>

<sup>27</sup> Annabelle Heugas, *The Geopolitics of Rakhine*, 6 November 2017, <https://www.bnionline.net/en/news/geopolitics-rakhine>

Cooperation (CNPC), diijinkan oleh pemerintah militer Myanmar untuk membeli gas dari cadangan Shwe, di cekungan lepas pantai Rakhine. Proyek Cina untuk mengambil gas dari Rakhine langsung ke wilayahnya direalisasikan pada tahun 2013 ketika gas dialirkan dari Kyaukphyu ke Provinsi Yunnan di Cina melalui jaringan pipa gas Myanmar-Cina yang konstruksinya dimulai pada tahun 2010. Setiap tahunnya mengalir gas sebanyak 12 milyar m<sup>3</sup>. Untuk proyek jaringan pipa minyak dan gas ini, Cina sudah berinvestasi sebanyak 2,5 milyar Dollar AS.<sup>28</sup> Rencananya Cina akan melakukan investasi sebesar 10 milyar Dollar AS di Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ). Mulai dari bulan Desember 2015, proyek tersebut dilakukan oleh CITIC Group milik Cina dan mencakup pembangunan pelabuhan laut dalam serta kompleks industry di sekitar kota Kyaukphyu di Rakhine. Wilayah seluas 17 km<sup>2</sup> akan dijadikan hub ekonomi maritim.

India dengan kebijakan “Act East” di bawah pemerintahan Perdana Menteri Modi berupaya mempunyai pengaruh di wilayah Timur. Pada tahun 2004, perusahaan milik negara India, yaitu GAIL dan ONGC Videsh (anak perusahaan Minyak dan Gas Alam India), bermitra dengan Daewoo untuk mengeksplorasi cadangan gas di Rakhine. Kedua perusahaan tersebut juga berinvestasi pada pembangunan jaringan pipa gas Myanmar-Cina ke Provinsi Yunnan. Ditandatangani pada tahun 2008, the Kaladan-Multi-Modal Transport Project bertujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Sittwe dan Kolkata, dengan rute pelayaran sepanjang 539 km melalui Teluk Bengal. Selanjutnya akan dibangun yang akan menghubungkan Sittwe ke Paletwa di negara bagian Chin, melanjutkan rute darat di provinsi Mizoram di India. Pada bulan Juli tahun 2016, India juga menciptakan Special Economic Zone di Sittwe seluas 1.000 hektar untuk menyaingi Special Economic Zone di Kyaukpyu milik Cina. Selain itu, perundingan tentang pembangunan pipa gas yang menghubungkan India, Myanmar dan Bangladesh juga dimulai kembali. Sebelumnya perundingan tersebut gagal karena ketidaksepakatan antara Bangladesh dan India.<sup>29</sup>

Tidak heran ketika Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya dengan cepat mengutuk krisis di Rakhine tahun 2017, Cina dan India hanya diam saja. Myanmar juga mengandalkan kekuatan veto Cina untuk berlindung dari sanksi Dewan Keamanan PBB.

Selain Cina dan India, negara-negara Timur Tengah juga sudah bekerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam industri minyak di negara bagian Rakhine. Riyadh dan Beijing menandatangani MoU pada tahun 2011 ketika Aramco, perusahaan milik negara Saudi, menyangupi akan menyediakan 200.000 minyak mentah per hari melalui jaringan pipa minyak Myanmar-Cina. Saudi juga bekerjasama dengan Sinopec Group untuk membangun kilang Yanbu di pesisir Laut Merah Saudi.<sup>30</sup> The United Arab Emirates juga membangun jalan dan hotel untuk mendukung industri minyak di Rakhine yang sedang berkembang pesat. Pada tahun 2014, Qatar mulai mengirim gas methane ke Cina melalui Myanmar, menunjukkan peran penting Myanmar dalam menghubungkan Cina dan negara-negara Arab Teluk.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Annabelle Heugas, *The Geopolitics of Rakhine*, 6 November 2017, <https://www.bnionline.net/en/news/geopolitics-rakhine>

<sup>29</sup> Annabelle Heugas, *The Geopolitics of Rakhine*, 6 November 2017, <https://www.bnionline.net/en/news/geopolitics-rakhine>

<sup>30</sup> Zoglul Kamal, *The Untapped Wealth of Rakhine and the Persecution of the Rohingya*, 26 September, 2017, <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/09/26/untapped-wealth-rakhine-persecution-rohingya/>

<sup>31</sup> Daniel Wagner, *The Pursuit of Money and Natural Resources: The Untold Story Behind Myanmar's Rohingyas*, 24 September 2017, [https://www.huffpost.com/entry/the-pursuit-of-money-and-natural-resources-the-untold\\_b\\_59c7b9bce4b0b7022a646b53?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAAE7zo4LVRG1IPVDwA\\_Ef2B-RGLeHh0BFA-H1AUecNJzTPuAir6rRXJi6BPcdtttd5WKMjPxNeD40yl7thietrl7oWy\\_R2yTKjuTVcdxB0hOpcVryCjxCtiwNAN389BLCIV4HeOlc45Rn48Dd2m\\_4q4tfkxE1pU1NNi3BGNn0Ag8](https://www.huffpost.com/entry/the-pursuit-of-money-and-natural-resources-the-untold_b_59c7b9bce4b0b7022a646b53?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE7zo4LVRG1IPVDwA_Ef2B-RGLeHh0BFA-H1AUecNJzTPuAir6rRXJi6BPcdtttd5WKMjPxNeD40yl7thietrl7oWy_R2yTKjuTVcdxB0hOpcVryCjxCtiwNAN389BLCIV4HeOlc45Rn48Dd2m_4q4tfkxE1pU1NNi3BGNn0Ag8)



Jaringan pipa sepanjang 771 km dimulai dari Teluk Bengal di negara bagian Rakhine merupakan lokasi di mana sebagian besar etnis Rohingya diusir.<sup>32</sup> Masyarakat pesisir Rohingya di Kyaukphyu dipaksa pergi pada tahun 2012 untuk memberi jalan bagi terbentuknya Kyaukphyu Special Economic Zone. Setelah terjadinya persekusi dan kekerasan tahun 2012, aktivis HAM Jamila Hanan, pendiri Save the Rohingya, mengatakan bahwa ada “pastinya ada kaitan antara pengembangan minyak dengan eliminasi etnis Rohingya” yang diusir dari Sittwe, yang akan dibangun menjadi pelabuhan laut dalam.<sup>33</sup> Myanmar mulai mengekspor gas dari proyek gas Shwe di lepas pantai Rakhine pada tahun 2014. Dari produksi gas setiap harinya yang berjumlah 400 juta kubik kaki, 379 juta di antaranya diekspor ke Cina.<sup>34</sup>

Myanmar pada bulan Januari 2017 mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan eksplorasi sekitar 37 ladang minyak dan gas sepanjang pesisir Rakhine. Sebuah laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dari Perancis, Indonesia, Cina, India, Rusia, Singapore, Thailand, Malaysia dan Hong Kong telah

<sup>32</sup> Zoglul Kamal, *The Untapped Wealth of Rakhine and the Persecution of the Rohingya*, 26 September, 2017, <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/09/26/untapped-wealth-rakhine-persecution-rohingya/>

<sup>33</sup> Zoglul Kamal, *The Untapped Wealth of Rakhine and the Persecution of the Rohingya*, 26 September, 2017, <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/09/26/untapped-wealth-rakhine-persecution-rohingya/>

<sup>34</sup> Zoglul Kamal, *The Untapped Wealth of Rakhine and the Persecution of the Rohingya*, 26 September, 2017, <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/09/26/untapped-wealth-rakhine-persecution-rohingya/>

melakukan investasi di *onshore projects* sementara perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan, Perancis, Malaysia, Cina, India, Thailand dan Vietnam semua terlibat dalam eksplorasi.<sup>35</sup>

#### IV. Isu Rohingya dan Menguatnya Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Ketika terjadi kekerasan anti Rohingya pada bulan Juni 2012 di Sittwe, Rakhine yang menyebabkan terjadi gelombang pengungsi Rohingya sepanjang tahun 2012-2013, isu Rohingya sangat memberikan dampak emosional pada kalangan Muslim di Indonesia. Anggota parlemen mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu untuk mengeluarkan protes resmi terhadap pemerintah Myanmar. Organisasi *mainstream* seperti Muhammadiyah mendesak Indonesia mengambil pengungsi Rohingya sementara pada bulan Agustus 2012 mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Myanmar sebagai ketua Palang Merah Indonesia, menjanjikan pemberian bantuan kemanusiaan. Beberapa rangkaian demonstrasi juga dilakukan di depan Kedutaan Myanmar di Jakarta, melibatkan PKS, Hizbut Tahrir dan berbagai koalisi organisasi Islamis.<sup>36</sup>

Meskipun sebagian besar kalangan Muslim lebih memilih mendukung upaya perdamaian untuk masalah Rohingya, beberapa kalangan Islamis di Indonesia berpendapat bahwa jihad dalam makna perang adalah solusi yang paling memungkinkan untuk mengakhiri penderitaan Rohingya. Pada tanggal 30 Juli 2012, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan bahwa jihad di Myanmar merupakan kewajiban bagi semua Muslim. Pada bulan Agustus 2012, FPI melakukan demonstrasi membela Rohingya dan beberapa anggotanya melemparkan batu ke dua kelenteng milik etnis Cina di Sulawesi Selatan.<sup>37</sup>

Ketika terjadi serangan terhadap Muslim di Meikhtila, Myanmar pada akhir bulan Maret 2013, Komite Advokasi Untuk Muslim Rohingya Arakan, KAMRA), yang didirikan oleh Bernard Abdul Jabbar, ketua cabang Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Bekasi, memberikan pernyataan pada tanggal 30 Maret 2013, yang salah satu kutipannya adalah:<sup>38</sup>

*Kami mendesak semua elemen masyarakat [...] terutama ummat Buddha di Indonesia, untuk menekan pemerintah Myanmar dan mendesak ummat Buddha Myanmar untuk menghentikan serangan mereka terhadap masjid-masjid dan mendesak Muslim untuk membantu saudara kita di Rohingya dan Meikhtila baik secara moral maupun material. Jika tidak ada solusi diplomatik yang dapat menghentikan kebrutalan rejim dan kalangan Buddha di Myanmar terhadap Muslims, maka KAMRA menyerukan semua Muslim dan Mujahidin untuk menjalankan misi jihad ke Myanmar untuk menghentikan kekerasan.*

---

<sup>35</sup> Zoglu Kamal, *The Untapped Wealth of Rakhine and the Persecution of the Rohingya*, 26 September, 2017, <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/09/26/untapped-wealth-rakhine-persecution-rohingya/>

<sup>36</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue <http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

<sup>37</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue <http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

<sup>38</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue <http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

Abu Bakar Ba'asyir dari sel penjara Keamanan Super Maksimum di Nusakambangan juga menyerukan Muslim Indonesia untuk berjihad di Myanmar pada tanggal 23 April 2013. Di hari yang sama, Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Myanmar dan mendesak pemerintah Thein Sein untuk mengambil tindakan tegas terhadap kekerasan terhadap Muslim di negaranya.

Di Indonesia, isu Rohingya juga dipakai sebagai alat untuk membangkitkan *ghirah* (semangat) calon simpatisan yang akan direkrut oleh kelompok VE. Sejak gelombang pengungsi tahun 2012-2013, narasi tentang persekusi terhadap Rohingya semakin meningkat di media-media online kalangan VE, mendorong mereka lebih banyak menggunakannya sebagai sarana kampanye untuk rekrutmen. Mereka menggunakan narasi bahwa adalah kewajiban ummat Islam untuk melindungi saudaranya yang sedang *didzalimi* di wilayah mana pun. Setelah kekerasan terhadap Rohingya terjadi lagi pada akhir bulan Maret 2013, pimpinan FPI, Habib Rizieq menyerukan jihad untuk melindungi Rohingya pada 4 Mei 2013 dan dua hari setelahnya, seruan ini muncul di, *voa-islam.com*, disertai dengan gambar-gambar mengenaskan dari masyarakat Rohingya di Myanmar. Pada bulan Juni 2013, *an-Najah*, majalah milik Jamaah Islamiyah (JI) juga mengupas tentang kekerasan terhadap Rohingya dalam edisi khususnya serta lembaga kemanusiaannya, Hilal Ahmar, mengadakan beberapa upaya penggalangan dana di Pulau Jawa untuk korban konflik di Suriah dan Myanmar. Majalah Time dengan judul sampul muka "The Face of Buddhist Terror" juga banyak beredar luas di kalangan kelompok-kelompok VE.<sup>39</sup>

Peralihan dari narasi ke aksi kekerasan mulai terlihat ketika beberapa orang ditangkap karena berencana menyerang Kedutaan Myanmar di Jakarta dengan bom rakitan pada 2 Mei tahun 2013, satu hari sebelum Forum Umat Islam (FUI) melakukan demonstrasi di tempat yang sama. Mereka merupakan kelompok pecahan Darul Islam dengan kemampuan yang lemah. Sementara itu, dua anggota Rohingya Solidarity Organisation (RSO) berkunjung ke Jakarta pada 19 Juni 2013 dan meminta audiens-nya yang sebagian besar berasal dari FPI dan FUI untuk mengirim instruktur bom ke Myanmar.<sup>40</sup>

Aksi kekerasan juga terjadi pada upaya pengeboman Ekayana Buddhist Centre di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 4 Agustus 2013. Sebelumnya pada awal tahun 2013, sebuah kelompok yang memiliki kaitan dengan mendiang Abu Roban (pemimpin pecahan faksi Darul Islam), berencana untuk membakar Pasar Glodok, daerah Pecinan di Jakarta, sebagai cara untuk membalas perlakuan kalangan Buddha kepada Muslim di Myanmar.<sup>41</sup>

Ketika gelombang pengungsi terjadi lagi pada tahun 2016-2017, beberapa kalangan Islamis di Indonesia kembali bereaksi dengan menyerukan jihad. "Ketika tahun 2016-2017 kebetulan untuk narasi VE ini yang banyak mengangkat itu bukan kelompok-kelompok teroris tapi kelompok-kelompok Islamis dan laskar seperti FPI," ujar Deka Anwar.<sup>42</sup> FPI misalnya, membuka posko-posko jihad di Solo, Aceh dan beberapa daerah lainnya. Ketua FPI Klaten Suyadi Al Abu Fatih memperkirakan perlu biaya sekitar Rp20-30 juta per

---

<sup>39</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue  
<http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

<sup>40</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue  
<http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

<sup>41</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue  
<http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Deka Anwar, peneliti IPAC, Jakarta, 19 April 2019.

orang untuk biaya perjalanan dan bekal selama hidup di sana. Relawan jihad untuk Rohingya yang dicari FPI adalah laki-laki sehat jasmani dan rohani berusia 21-40 tahun. Pendaftar yang baru berusia 17-20 tahun wajib melampirkan izin tertulis dari orang tua. Adapun syarat administrasinya cukup mengisi formulir yang disediakan di posko pendaftaran atau diunduh dari akun Facebook FPI serta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk. Calon relawan jihad bela Rohingya yang memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan akan segera dikirimkan ke FPI pusat di Jakarta untuk mengikuti pembekalan mental, fisik, dan tenaga dalam. Salah seorang simpatisan FPI di Klaten, Indra, 31 tahun, karyawan swasta, mengaku siap berangkat ke Myanmar sebagai relawan jihad untuk Rohingya dan tidak khawatir soal dana. Pada 3 September 2017, FPI Klaten mengumpulkan dana untuk etnis Rohingya sekitar Rp15 juta.<sup>43</sup> Menurut Nasir Abbas, upaya FPI bisa dikatakan tidak serius. “FPI itu orangnya *show off*. Tidak ada yang berangkat. Pertanyaannya, nyampe gak tuh duit ke sana? Apakah yang nyumbang itu tahu? Padahal banyak yang nyumbang. Jika orang itu ingin berangkat, semuanya itu pasti berangkat secara diam-diam. Tidak akan kasih tahu,” katanya.<sup>44</sup>

Menurut Nasir Abbas, isu Rohingya tidak akan membuat banyak jihadis dari Indonesia datang ke Myanmar. Pada tahun 1994 Nasir Abbas bersama dengan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) waktu itu pergi ke Cox Bazaar dan menginap di rumah anggota RSO yang dianggap sebagai *safehouse*. Mereka kemudian menyeberang sungai masuk ke wilayah Arakan (Rakine State). Niat awal mereka adalah untuk mendirikan camp militer dan peluang orang-orang JI untuk datang ke sana. “Kami kaget karena mereka berpakaian Tablighi”, kata Nasir. Setelah melakukan *assessment*, Nasir Abbas dan Hambali kemudian membatalkan rencana mereka. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa mereka membatalkan rencana mereka. Yang pertama, orang-orang Rohingya yang sebagian besar Jamaah Tabligh tidak memiliki semangat bertempur ataupun angkat senjata. Kedua, mereka hidup berpindah-pindah sehingga tidak ada wilayah yang dikuasai untuk dijadikan *camp* militer. Ketiga, mereka hidup miskin, tidak punya apa-apa dan senjata juga terbatas. Keempat, pengawasan ketat dari rejim militer Myanmar tidak saja membahayakan orang-orang JI yang akan datang, tetapi juga membahayakan komunitas etnis Rohingya secara keseluruhan. “Apa gunanya duit kalau kita tidak bisa apa-apa. Mau bawa senjata dari luar, mau menyerang mana?”, kata Nasir Abbas. Terakhir, penyandang dana dari Timur Tengah tidak tertarik untuk mendanai. “Dukungan internasional tidak ada. Liga Arab tidak punya kepentingan di situ. Kenapa Amerika bantu mujahidin Afghanistan? Karena dia mau jaga Pakistan kalau kalah di Afghanistan, Rusia bisa masuk, mundur ke Selatan. Kenapa bantu ke Syria, karena punya kepentingan. Di Rohingya tidak ada kepentingan apa-apa maka jadi seperti itu. Harusnya orang-orang Rohingya sadar keadaan mereka itu. Dari segi politisnya status dia yang belum jelas warga negara apa. Jadi yang harus diperjuangkan bukan angkat senjata, yang harus diperjuangkan status dia. Supaya diterima sebagai warga negara apa. Itu yang harus ditarik perhatian dari negara-negara lain,” katanya. Nasir Abbas kemudian melapor ke Abu Baka Ba’asyir saat itu. “Makanya saya angkat tangan, karena membahayakan pihak mereka dan juga JI”, kata Nasir Abbas.<sup>45</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Lukman Azis, Direktur Aksi Cepat Tanggap (ACT), “Orang Rohingya tidak terbiasa dengan pola melawan. Kalau Indonesia kan pernah mengalami dijajah, melakukan perlawanan, sedangkan mereka tidak punya budaya melakukan perlawanan. Sebanyak itu pasrah aja. Ada beberapa

---

<sup>43</sup> *Jihad ke Rohingya, FPI Perkiraan Biayanya Rp20-30 Juta per Orang*, 4 September 2017, <https://nasional.tempo.co/read/905803/jihad-ke-rohingya-fpi-perkiraan-biayanya-rp20-30-juta-per-orang>

<sup>44</sup> Wawancara dengan Nasir Abbas di Jakarta, 21 April 2019.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Nasir Abbas di Jakarta, 21 April 2019.



yang melakukan perlawanan tapi disebut ekstremis dan itu dijadikan buat pemerintah Myanmar untuk melakukan memukul balik bahwa mereka mencari ekstremis-ekstremis,” katanya.<sup>46</sup> Selain memberikan bantuan kemanusiaan, ACT merupakan salah satu pendiri Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR). Presiden KNSR yaitu Suhelmain Syukur adalah Senior Vice President ACT. “KNSR, yang tugasnya melakukan upaya-upaya support dukungan diplomatis. Jadi mencari dukungan PBB, mencari dukungan internasional, itu tugas dari KNSR. ACT fokus kepada isu kemanusiaannya bagaimana mereka bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa hidup, bisa dapat pekerjaan,” ujar Lukman.

Menurut Lukman, KNSR bersama-sama dengan beberapa kekuatan lain, termasuk di dalamnya, FPI, One Care, AQL, dan lembaga UBN (Ustadz Bachtiar Nasir – red) mendukung upaya diplomatis kepada pemerintah, menekan pemerintah, menyatakan kecaman kepada PBB dan ASEAN. Kegiatan mereka juga termasuk mengadakan diskusi publik. “Kalau ummat Islam massif tergerak untuk membantu bahkan bukan hanya ummat Islam, non Muslim juga ada. Karena lebih ke rasa solidaritas kemanusiaan. Kasus Rohingya ini sebagian besar ummat Islam menganggap adalah kasus rasis agama. Ada yang bilang suku, tapi ada juga yang menganggap tadi. Ini adalah masalah politik dan ekonomi. Mengingat spekulasi seperti itu, makanya perhatian publik juga besar,” ujarnya.

Seruan jihad ke Rohingya kemudian berkurang ketika pemerintah Indonesia membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya (AKIM). Menurut Deka Anwar strategi ini cukup efektif untuk meredam penggunaan isu Rohingya oleh kalangan VE. “Beberapa wihara ya, kayak di Ekayana itu sempet di bom Molotov, itu memang karena dipengaruhi narasi kekerasan, dendam terhadap masyarakat Buddhist, yang Rakhine. Tapi itu periode pada kasus konflik yang pertama di tahun 2012. Jadi isu itu yang banyak mengambil alih kelompok kekerasan. Ketika di tahun 2017 pecah konflik di Rakhine yang akhirnya 700 ribu orang mengungsi, narasi kekerasan itu agak kurang banyak. Tapi yang mengambil alih itu banyak aksi kemanusiaan,” kata Deka.

Namun, narasi tentang Rohingya dan kewajiban membela mereka masih terus bergulir. Menurut Indriana Kartini, narasi Rohingya bisa menambah narasi untuk ketidakadilan terhadap Muslim.

*“Bahwa Muslim sedang didzalimi. Muslim sedang mengalami ketidakadilan, dan tidak ada orang atau negara Barat yang bertindak. Itu narasi yang digunakan tidak hanya orang-orang yang terekrut jadi teroris tapi mungkin awalnya menerima narasi itu dan setuju. Orang-orang yang tadinya memiliki pemikiran liberal, yang tadinya tidak bersimpati terhadap Islam, khususnya, akhirnya ketika sering digunakan narasi itu, apalagi sekarang lewat Instagram, itu lebih efektif karena orang sekarang kan malas baca di media-media mainstream. Kalau di Instagram kan lebih enak, capture, kalimatnya sedikit-sedikit, ada foto dan video dan bisa diulang-ulang kita baca,” ujarnya.<sup>47</sup>*

Media sosial, menurut Indriana, seperti Instagram atau Facebook biasanya memiliki sistem algoritma yang memberikan jenis informasi yang serupa dengan yang seseorang sering akses dan itu membuat orang tersebut akhirnya menelusuri berbagai informasi yang sebenarnya berasal dari satu ide tersebut. Namun sayangnya sistem tersebut tidak menyediakan kontra narasinya.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Lukman Azis, Direktur ACT di Jakarta, 27 April 2019.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Indriana Kartini, Jakarta, 22 April 2019.

“Jadi kalau yang untuk orang awam yang tadinya tidak meyakini atau tidak mempercayai itu, ketika disuguhi dengan narasi-narasi, dengan gambar-gambar itu kan jadi terkena. Kita juga tidak tahu apakah videonya baru ya, kalau di media sosial kan pinter ya untuk ngasih gambar-gambar yang dramatis. Nah itu orang yang tadinya berpikir apatis ketika disuguhi....Terrorism yang jaman sekarang kan gak seperti dulu. Sekarang kan sudah menggunakan media sosial. Dan itu perekrutan bagus lewat....ISIS pesuruhnya kan kadang-kadang lewat medsos. Efektif. Awalnya menyetujui, kemudian lama-lama percaya, kemudian menjadi radikal, misalnya dia ketemu dengan komunitas yang sama, yang memiliki kesamaan ide itu. Misalnya awalnya dulu dia tidak seperti itu lalu sekarang sangat keras membela itu,” ujar Indriana.<sup>48</sup>

Menurut Nasir Abbas, isu Rohingya bisa digunakan untuk meradikalisasi anak-anak muda. “Itu isu-isu intimidasi, tekanan umat Islam di luar negeri sangat bagus untuk membuka pikiran orang. Tumbuh rasa simpati, tumbuh rasa solidaritas, tumbuh rasa empati, tumbuh rasa ingin membela, tumbuh rasa ingin memperjuangkan. Dulu saya pakai gituan. Foto-foto, video, tulisan, testimoni, apalagi sekarang. Foto-foto dibantai,” katanya.<sup>49</sup> Saat ini media yang paling sering digunakan untuk rekrutmen menurut Nasir Abbas adalah handphone. “WA group, broadcast, broadcast. Kita baca saja broadcastnya, hati kita sudah marah, tersentuh. Itu kan maksud mereka, membuat orang jadi satu persepsi. Bagaimana membuat orang setuju dengan apa yang saya paham. Kadang broadcast tuh diulang-ulang, sehingga tertanam,” ujarnya.

Contoh konkret dari hal tersebut adalah kasus Nur Zam Zam, seorang mahasiswa ilmu sosial di Universitas Negeri Riau (UNRI) yang juga anggota pecinta alam. Pada bulan Desember 2017, Nur Zam Zam mengikuti berita tentang Rohingya melalui media sosial. Dia lalu mendaftar ke FPI setempat untuk berjihad. Namun Nur Zam Zam ditolak karena hanya bermodalkan semangat tapi tidak memiliki dana. Akhirnya dia mengakses media online ISIS dan berupaya membuat bom untuk melakukan penyerangan di Indonesia.<sup>50</sup>

Menurut Deka Anwar, pada tataran aksi, banyak kelompok Ekstremisme Kekerasan yang mendistorsi isu-isu Rohingya secara sistematis dan menggunakannya untuk menyerang sasaran mereka yang sebenarnya, yaitu pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi.<sup>51</sup> Pada bulan September 2012, Muhamad Thoriq, salah seorang yang ditangkap ketika sedang merakit bom di Bojong, Depok, mengatakan bahwa kelompoknya berencana untuk menyerang markas polisi di Jakarta Pusat dan markas Brimob karena mereka bagian dari pemerintahan *thoghut* yang tidak menegakkan hukum Islam. Selain itu mereka juga menargetkan untuk menyerang umat Kristen karena misionaris Kristen telah memurtadkan orang Islam. Mereka juga akan menyerang umat Buddha karena telah membunuh banyak Muslim di Myanmar. Di saat yang sama Chamidi, yang mengklaim sebagai anggota Al-Qaeda Indonesia, ketika tertangkap di Solo, mengatakan bahwa target kelompoknya adalah komunitas Ahmadiyah, gedung-gedung pemerintahan karena pemerintah tidak menegakkan hokum Islam, serta gereja-gereja karena merupakan rumah kaum kafir, serta komunitas Buddha karena mereka memerangi Muslim di Myanmar.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Indriana Kartini, Jakarta, 22 April 2019.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Nasir Abbas di Jakarta, 21 April 2019.

<sup>50</sup> Surat Dakwaan atas nama Nur Zam Zam alias Zam Zam alias Amat alias Zeg, No. Registrasi Perkara: PDM-60/JKT.TIM/010/2018, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, 31 Oktober 2018.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Deka Anwar, peneliti IPAC, Jakarta, 19 April 2019.

<sup>52</sup> Indonesian Extremists and the Rohingya Issue

<http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>, diakses 20 Mei 2019.

## V. Upaya Pemerintah RI dan Organisasi Islam *Mainstream* Membedakan Isu Rohingya dalam Perspektif Masalah Kemanusiaan

Walaupun belum meratifikasi konvensi 1951 soal pengungsi, sebagai respon terhadap gelombang pengungsi Rohingya terbesar pada tahun 2017, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, menggagas pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). AKIM merupakan aliansi 10 lembaga kemanusiaan di Indonesia terdiri dari Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (Nahdlatul Ulama), PKPU Human Initiative, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Peduli Ummat (Daarut Tauhiid), LAZIS Wahdah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, serta Social Trust Fund (UIN Jakarta). yang berkolaborasi dengan dan seluruh elemen Masyarakat Indonesia. AKIM berupaya membantu penanganan masalah konflik dan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, melalui pendekatan *humanitarian diplomacy* yang menyorot empat isu dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, mata pencaharian (*livelihood*) dan pemenuhan layanan dasar (*relief*).

Dalam menyikapi maraknya pemberitaan tentang masalah Rohingya di Myanmar, AKIM menjelaskan dalam *release*-nya ada beberapa hal yang perlu dijadikan pemahaman bersama berbagai pihak dalam membantu penanganan masalah konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar: "AKIM mengajak kepada seluruh pihak dalam proses penggalangan dana untuk tidak mengeksploitasi secara berlebihan gambar korban yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. AKIM mengajak semua pihak merespon dengan tepat dan menahan diri terhadap upaya provokatif untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil, serta melakukan usaha dan strategi yang dapat mempercepat terwujudnya rekonsiliasi antara komunitas Rohingya dan Rakhine".<sup>53</sup>

Dalam menyelenggarakan bantuan kemanusiaan, AKIM melakukan pendekatan secara inklusif dan *constructive engagement* kepada komunitas Rohingya (Muslim) dan Rakhine (Buddha), karena hakikat keduanya sama-sama hidup dalam kemiskinan dan sebagai korban konflik. Program AKIM tersebut menjadi bagian dari *soft diplomacy* karena pendekatan inilah yang selama ini selalu bisa diterima oleh Pemerintah Union Myanmar dalam membantu mengatasi dampak konflik sosial yang terjadi. Saat ini satu-satunya negara yang masih dan dapat diterima oleh Pemerintah Myanmar adalah Indonesia.

Indonesia sudah memiliki program bantuan kemanusiaan di camp pengungsi di Cox Bazar (Bangladesh) dan berencana membuka program di Rakhine. Namun program bantuan kemanusiaan di Cox Bazar harus terhenti karena sulitnya mendapatkan visa dari pemerintah Bangladesh. "Itu pun cuma 7 bulan, habis itu visanya susah. Jadi kita stop karena NGO tidak boleh melakukan kerja. Tidak ada visa jenis pemberian bantuan kemanusiaan," ujar Rachmawati Hussein, Wakil Direktur Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).<sup>54</sup> Menurut Rachmawati, program AKIM semula direncanakan akan berakhir tahun 2020 dan akan menggabungkan program relief dan juga membangun perdamaian melalui pasar perdamaian dan sekolah untuk memperkuat kohesivitas sosial. "Kita berharap nanti ada interaksi antara Muslim dan non Muslim. Kita cari area yan orang Buddhanya juga ada di situ. Jadi ada jual-beli, minimal ada interaksi. Dan interaksi itu yang dibangun, tidak *secluded*. Membangun itu memang tidak mudah. Kalau tidak ada sama sekali kan mereka *isolated* kurang barangnya tidak ada barter selama ini. Barter selama ini kan bahan

---

<sup>53</sup> *Release Penanganan Konflik Kemanusiaan Rohingya dan Rakhine di Myanmar*, September 2017, <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/8241/release-penanganan-konflik-kemanusiaan-rohingya-dan-rakhine-di-myanmar>, diakses pada 21 April 2019.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Rachmawati Hussein, Wakil Direktur Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Jakarta, 14 Mei 2019.

pertanian dari Rohingya, barang-barang jadi dari etnis Buddha Myanmar. Jadi itu yang coba kita bangun,” ujarnya.

Berbeda dengan beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia yang tergabung ke dalam AKIM, ACT memutuskan tidak bergabung. “AKIM kan bentukannya pemerintah ya. Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar, bantuan itu banyak mengalir ke Myanmar, walaupun ada juga di Bangladesh. Sedangkan logika kita, walaupun ada juga ke Bangladesh, tapi ketika masuk kategorinya Myanmar, loh masyarakat Rohingya itu dibantai oleh pemerintahnya sendiri, lah masak kita kerjasamanya dengan pemerintah Myanmar? Yang ada bantuan dari publik, dari masyarakat tidak sampai kepada mereka, yang ada sampai ke kelompoknya mereka. Itu yang mendasari kita sulit untuk bergabung ke situ. Kalau bantuannya itu langsung ke Myanmar tidak melalui, kan bantuan-bantuan AKIM pun dilakukan dibangun di Myanmar, misalnya bikin sekolah, bikin Rumah Sakit itu bikinnya di Myanmar. Lah pengungsinya itu kan larinya ke Bangladesh, ke India, ke Malaysia, ke mana-mana, lah di sana yang pakai siapa?,” ujar Lukman Azis.<sup>55</sup>

Bantuan kemanusiaan, menurut Nasir Abbas, bisa menjadi pintu masuk bantuan untuk kelompok bersenjata. “Dulu saya begitu. Teman-teman itu ambil kesempatan waktu di Ambon. Sumbangan, sumbangan, Ambon, untuk kemanusiaan. Kalau orang awam, orang berpikir untuk kemanusiaan apa, pakaian, makanan, duit, obat-obatan. Tapi kita tidak, dari sumbangan itu disisihkan untuk beli senjata. Kenapa? Karena beli senjata itu bagian dari kemanusiaan. Untuk membela diri. Jadi pembenaran bagi masyarakat untuk beli senjata, bahan peledak dan lain-lain. Jadi porsi untuk beli makanan, obat-obatan kadang-kadang lebih sedikit daripada untuk beli senjata,” katanya.<sup>56</sup> Menurut Nasir Abbas ada pengusaha-pengusaha di Indonesia yang *ghiroh* Islamnya besar untuk memperjuangkan Islam tapi tidak mau ikut terlibat langsung. Namun secara diam-diam atas nama kemanusiaan dia bantu. “Pertanyaannya dana itu kemana dan digunakan untuk apa, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya itu tidak jelas. Kalau tidak jelas ya mereka sewenang-wenang sesuka mereka. Menurut mereka benar, beli senjata bantu kemanusiaan, ya benar. Infaq fi sabilillah, ya kan. Fi sabilillah itu perlu senjata. Di jalan Allah. Itu perang. Ya makanya itu, fii sabilillah makanan, pangan, sandang, papan, obat-obatan, senjata. Kita itu orang baik, bukan orang Barat yang kalau pun nyumbang, mikir-mikir, gitu kan?,” katanya.

Menurut Nasir Abbas, *ghiroh* orang-orang tersebut meningkat karena diprovokasi orang-orang yang mau mendirikan negara Islam, menegakkan Islam, membela Islam, sehingga orang Islam harus berjihad. Mereka menggunakan hadist Nabi yang mengatakan, “sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang gara-gara satu anak panah. Karena satu anak panah, tiga orang masuk surga”. Siapa itu tiga orang? Pertama, yang membuatnya. Kedua yang mendanai pembuatan anak panah. Yang ketiga, yang menggunakan anak panah. Jadi ketiganya masuk surga. “Bagi pengusaha dia bukan bagian yang menggunakan, tidak tahu membuat, jadi mengambil bagian yang mendanai. Anak panahnya sekarang diibaratkan apa sajalah. Kamu mau ambil posisi apa? Sebagai eksekutor, sebagai pembuatnya, atau sebagai pendananya? Di Indonesia ini banyak pendananya dan banyak yang gak mau tahu untuk apa uang itu,” katanya.

Menurut Abdul Malik dari MDMC, tidak ada kaitan antara bantuan kemanusiaan dengan kelompok bersenjata pada kasus Rohingya. “Kita tidak menemukan itu. Mendengarnya iya, tapi kan kalau issue

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Lukman Azis, Direktur ACT di Jakarta, 27 April 2019.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Nasir Abbas di Jakarta, 21 April 2019.

harus diverifikasi kembali. Kita tidak terlalu fokus untuk mengikuti perkembangan tersebut,” katanya.<sup>57</sup> Ketika melakukan *remote assessment*, dengan memakai MDMC mendapatkan data bahwa pada hari kedua pasca kejadian tahun 2016 di Myanmar, ada lebih dari 7000 orang pengungsi. Selanjutnya pada sore hari terjadi eskalasi menjadi 15.000. Hari ketiga kejadian naik menjadi 24.000 pengungsi. “Ini angkanya naik terus dan kita memahami bahwa ini sudah jadi international concern dan Muhammadiyah harus membantu,” ujar Abdul Malik. Dalam kurun waktu 14 hari atau dua minggu, terhimpun dana sebanyak lebih dari Rp 10 milyar yang kemudian mencapai Rp 20 milyar dari donasi ke Lembaga ZIS Muhammadiyah (Lazismu). Dana tersebut kemudian digunakan untuk layanan di Cox Bazar berupa bantuan kuratif, pelayanan medis, serta dukungan psikososial kepada anak-anak dan para korban. Selain itu juga dukungan spiritualitas berupa musholla dekat dengan camp. Kemudian nutrisi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Di dalam camp kita ada children center, children-friendly space yang anak-anak bisa belajar, bermain, edukasi perilaku sehat, bersih dan lainnya. Organisasi lain di dalam AKIM bergerak di bidang-bidang lain seperti makanan, logistic, shelter, wash (water sanitation and hygiene), serta pendidikan.

Dana Rp 20 milyar tersebut saat ini sudah diaudit dan sisanya akan dipakai untuk program di Rakhine State. Menurut Rachmawati Hussein, dana tersebut akan dipakai untuk melatih tenaga kesehatan local. Tenaga asing tidak bisa masuk selain itu juga ada kendala bahasa sehingga intervensi yang akan dilakukan adalah melatih bidan dan dokter di sana. “Cuma persoalannya sekarang orang Buddha yang melayani Rohingya pada diancam semua sama komunitasnya. Makanya susah karena orang Rohingyanya sendiri gak ada yang sekolahan. Itu yang menjadi persoalan besar karena sekarang guru-guru Buddha itu gak mau lagi mengajar. Sebenarnya mereka masih mau mengajar tapi diancam komunitasnya. Kalau kamu mengajar lagi, nanti bisa dihabisin atau diapain, diancam mereka kan juga takut. Bidan-bidan juga begitu. Jadi susah makanya layanannya jadi sangat terbatas. Di klinik yang kita kunjungi itu akhirnya cuma ada satu bidan dan satu dokter padahal Rohingya kan banyak yang cadaran juga. Itu kan gak mau sama sekali diperiksa sama yang laki-laki. Akhirnya kan melahirkan hanya dengan bidan. Padahal bidannya aja terbatas. Jadi keamanan ibu dan bayinya susah. Kalau di Cox’s Bazar kita banyak dokter perempuan yang terlibat, jadi kan gak masalah. Tim kesehatannya Muhammadiyah selalu ada dokter, bidan dan perawat. Itu sudah paketan,” kata Rachmawati.

## **VI. Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan Masalah Rohingya**

Pasal 38 Deklarasi HAM ASEAN menyebutkan bahwa: “Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus menerus memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian, keharmonisan, dan stabilitas di kawasan.”

Masalah yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar kemudian mendorong ASEAN's disaster management unit (AHA Centre) membuat ASEAN's Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT). Tim ini membuat Preliminary Needs Assessment report setelah mengunjungi negara bagian Rakhine bulan Maret 2019. Dokumen tersebut mengidentifikasi bidang-bidang yang bisa ditawarkan ASEAN untuk memfasilitasi proses repatriasi, termasuk keamanan fisik, keamanan material, registrasi bagi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Abdul Malik, Sekretaris Muhammadiyah Disaster Management Center, di Jakarta, 23 April 2019.

Rohingya dan kohesi. Namun demikian, ERAT tidak memiliki otoritas untuk menyelidiki pelanggaran HAM oleh tentara Myanmar. “Kami hanya bisa merekomendasikan bagaimana membuat proses repatriasi lebih baik, seperti registrasi, fasilitas yang lebih baik, menyediakan pelayanan bagi pengungsi seperti bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pelayanan medis,” ujar Direktur Eksekutif AHA Centre, Adelina Kamal seperti dikutip oleh Channel News Asia<sup>58</sup>.

Dokumen yang dibocorkan oleh AFP tersebut kemudian mendapat respon dari diaspora Rohingya. Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) menyatakan dalam releasenya: *“ASEAN should not allow Myanmar to continue her atrocious process against Rohingya. Rather, it should address the root cause of the Rohingya crisis towards finding a permanent solution, actively support the credible accountability efforts to ensure victims see justice served and the cycle of violence is not repeated, so as to ensure voluntary safe, dignified and sustainable repatriation of all refugees with their full Myanmar citizenship, within a specified time, to their original places in Arakan/Rakhine state, not to displacement sites.”*<sup>59</sup>

## VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Motif ekonomi, etno-religius dan sejarah melatarbelakangi krisis Rohingya di Rakhine. Oleh karena itu perlu pemahaman yang komprehensif untuk tidak melihat masalah Rohingya hanya dari perspektif pendzoliman terhadap ummat Islam saja.

Jika krisis Rohingya terus berlanjut, akankah Indonesia mampu menahan kelompok-kelompok VE yang selalu memanfaatkan isu tersebut untuk menjustifikasi penyerangan terhadap pemerintah?

### Rekomendasi:

1. Institusi pendidikan Indonesia: Penanaman cara berpikir kritis sejak awal di sekolah. Serta memperkaya pengetahuan tentang masalah kebangsaan dan toleransi.
2. Organisasi masyarakat Indonesia: Memberdayakan peran ormas-ormas mainstream untuk membuat kontra narasi radikalisme dan menyebarkannya.
3. Pemerintah Indonesia: memberdayakan mantan narapidana teroris untuk program-program pencegahan dan deradikalisasi. Mantan napiter yang sudah direhabilitasi di penjara diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan mengambil peran sebagai agen perdamaian.
4. Pemerintah Indonesia: Memperkuat kemampuan dan kapasitas unit-unit kontra terorisme dengan memperhatikan penggunaan narasi isu Rohingya.
5. Pemerintah Indonesia: Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai isu Rohingya melalui upaya media literasi dan juga melibatkan pengungsi Rohingya.
6. Pemerintah Indonesia: mengawal penanganan masalah pengungsi Rohingya dari sejak di kamp pengungsi sampai dengan proses repatriasi.
7. ASEAN: Menyelesaikan krisis Rohingya sebelum menjadi masalah terorisme yang serius. Selain itu juga memastikan mekanisme repatriasi juga berjalan seiring dengan dihapuskannya status stateless terhadap Rohingya. Karena membiarkan status stateless pada seseorang melanggar hukum internasional.

---

<sup>58</sup> Leong Wai Kit, *AHA Centre Defends Leaked Report on Rohingya Refugees*, 10 Juni 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/aaha-centre-defends-leaked-report-on-rohingya-refugees-11613142>.

<sup>59</sup> Press Release ARNO’s Concern Over ASEAN-ERAT Report, 12 Juni 2019, <https://www.rohingya.org/press-release-arnos-concern-over-asean-erat-report/>

## DAFTAR PUSTAKA

Anders Corr, Secret 1978 Document Indicates Burma Recognized Rohingya Legal Residence Dec 29, 2016, <https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/12/29/secret-1978-document-indicates-burma-recognized-rohingya-legal-residence/#3f4575cf5a79>

Anders Engvall and Soe Nandar Linn, Development, Natural Resources and Conflict in Myanmar, 13 Juni 2013, <https://www.eastasiaforum.org/2013/06/13/development-natural-resources-and-conflict-in-myanmar/>

Annabelle Heugas, *The Geopolitics of Rakhine*, 6 November 2017, <https://www.bnionline.net/en/news/geopolitics-rakhine>

Ashrafuzzaman Khan, *The Strategic Importance of Rakhine State*, <https://www.thedailystar.net/news/opinion/perspective/the-strategic-importance-rakhine-state-1628290>

Daniel Wagner, *The Pursuit of Money and Natural Resources: The Untold Story Behind Myanmar's Rohingyas*, 24 September 2017, [https://www.huffpost.com/entry/the-pursuit-of-money-and-natural-resources-the-untold-b-59c7b9bce4b0b7022a646b53?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlMmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAAE7zo4LvRG1IPVDwA\\_Ef2B-RGLeHh0BFA-H1AUecNJzTPuAir6rRXJi6BPcdtttd5WKMjPxNeD40yI7thietrl7oWy\\_R2yTKjuTVcdxB0hOpcVryCjxCtiwNAN389BLCIV4HeOlc45Rn48Dd2m\\_4q4tfkxE1pU1NNii3BGNn0Ag8](https://www.huffpost.com/entry/the-pursuit-of-money-and-natural-resources-the-untold-b-59c7b9bce4b0b7022a646b53?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlMmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE7zo4LvRG1IPVDwA_Ef2B-RGLeHh0BFA-H1AUecNJzTPuAir6rRXJi6BPcdtttd5WKMjPxNeD40yI7thietrl7oWy_R2yTKjuTVcdxB0hOpcVryCjxCtiwNAN389BLCIV4HeOlc45Rn48Dd2m_4q4tfkxE1pU1NNii3BGNn0Ag8)

Indonesian Extremists and the Rohingya Issue <http://www.Understandingconflict.Org/En/Conflict/Read/9/Indonesian-Extremists-And-The-Rohingya-Issue>

Iftekharul Bashar, *Exploitation of the Rohingya Crisis by Jihadist Groups: Implications for Bangladesh's Internal Security*, Counter Terrorist Trends and Analyses , Vol. 9, No. 9 (September 2017), <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351550>

Jaume Rius Lopez, *Hate Speech, Interethnic Violence and 'Muslim-Free' Villages: The Rohingya Crisis in an Era of International Indifference*, 20 Feb 2019, <https://minorityrights.org/2019/02/20/hate-speech-interethnic-violence-and-muslim-free-villages-the-rohingya-crisis-in-an-era-of-international-indifference/>

Leong Wai Kit, *AHA Centre Defends Leaked Report on Rohingya Refugees*, 10 Juni 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/aaha-centre-defends-leaked-report-on-rohingya-refugees-11613142>

Melissa Crouch, *The Twisted Politics of Terrorism in Myanmar*, 12 Sep 2017, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/threat-terrorism-too-convenient-myanmar>

Myanmar: Tatmadaw leaders must be investigated for genocide, crimes against humanity, war crimes – UN Report, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23475&LangID=E>

Nurul Islam, *Facts about the Rohingya Muslims of Arakan*, Oct 5, 2006, <https://www.rohingya.org/facts-about-the-rohingya-muslims-of-arakan/>

*Press Release ARNO's Concern Over ASEAN-ERAT Report*, 12 Juni 2019, <https://www.rohingya.org/press-release-arnos-concern-over-asean-erat-report/>

*Release Penanganan Konflik Kemanusiaan Rohingya dan Rakhine di Myanmar*, September 2017, <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/8241/release-penanganan-konflik-kemanusiaan-rohingya-dan-rakhine-di-myanmar>.

Surat Dakwaan atas nama Nur Zam Zam alias Zam Zam alias Amat alias Zeg, No. Registrasi Perkara: PDM-60/JKT.TIM/010/2018, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, 31 Oktober 2018.

Zoglul Kamal, *The Untapped Wealth of Rakhine and the Persecution of the Rohingya*, 26 September, 2017, <https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/09/26/untapped-wealth-rakhine-persecution-rohingya/>